



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Senin, 11 Agustus 2025



## RINGKASAN BERITA HARI INI

### Bupati Subandi Sidak RTLH di Prambon, Dua Rumah Warga Simogirang Langsung Direnovasi



### Sidoarjo Kabupaten Layak Anak Peringkat Utama

Sidoarjo, Memorandum Kabupaten Sidoarjo kembali mengukir prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Peringkat Utama Tahun 2025. Penghargaan itu diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PFP) Arifuddin Chalid Fozil kepada Bupati Sidoarjo Subandi pada Malam Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) 2025 di Jakarta, Jumat (8/8).

Pencapaian KLA peringkat utama ini merupakan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, tingkat Nindya. Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi komprehensif Pemkab Sidoarjo. Juga, semakin diperkuat dengan dilantiknya Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Perda tersebut menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya memenuhkan dan melindungi hak-hak anak serta mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan rasa syukur dan bangga atas ketetapan ini. "Alhamdulillah. Setelah upaya berbagai tahapan dan evaluasi, Sidoarjo berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam penilaian KLA," ujarnya.

Keberhasilan Sidoarjo meraih Peringkat Utama menunjukkan komitmen kuat Pemkab Sidoarjo dalam mewujudkan sistem pembangunan berbasis hak anak.

Penilaian KLA melibatkan berbagai indikator, di antaranya: pemenuhan hak sipil anak, perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung tumbuh kembang anak.

Perlu diketahui bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemPPA) menganggarkan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2025 kepada 355 Kabupaten/Kota, 702 Kota, dan 62 kategori Utama, 69 kategori Nindya, dan kabupaten/kota dan kategori Pratama.

### Pro Kontra Penolakan LKPj APBD 2024, Dua Elemen Masyarakat Geruduk Kantor DPRD Sidoarjo



Syukuran 27 tahun UTI di Sidoarjo.

### Syukuran 27 Tahun IJTI Jurnalis TV Dituntut Matang dan Dewasa

Sidoarjo, Memorandum Menjunjung tinggi jurnalisisme positif untuk memperkuat kemerdekaan pers dan kedaulatan informasi nasional, jurnalis TV saat ini harus bisa lebih matang dan dewasa dalam pemberitaan. Plus, harus dapat mengedukasi masyarakat. Harapan itu disampaikan Wakilpolresta Sidoarjo AKBP M Zainur Rofiq saat menghadiri syukuran 27 tahun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Sekretariat Korda Sidoarjo, Sabtu (9/8).

Menurut mantan kapolres Lumajang dan Madiun itu, jurnalis TV saat ini tidak hanya dituntut untuk memberitakan suatu peristiwa atau kejadian secara cepat dan lugas. Namun juga harus menyajikan pemberitaan yang mengedukasi. Untuk mendukung itu, Polresta Sidoarjo siap berkolaborasi dan bersinergi lebih optimal.

Khususnya dalam menyampaikan informasi kinerja Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan sesuai Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. "Semoga di usia ke-27 ini, jurnalis TV yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia terus berkolaborasi dan bersinergi dengan Polri dalam mewujudkan pemberitaan yang dapat mengedukasi masyarakat," ujarnya.

Ketua IJTI Korda Sidoarjo Pramono Putra menegaskan, siap mewujudkan hal itu dengan tetap memperhatikan kaidah jurnalistik dalam mewujudkan jurnalisisme positif. "IJTI di Sidoarjo siap berkolaborasi dan memperkuat sinergi dengan Polri dan pemerintah dalam pemberitaan yang bisa mengedukasi masyarakat," ujarnya. (san/epe)

### Guru Tampar Siswa SMK di Krian Berakhir Damai

SIDOARJO - Aksi guru menampar siswa di SMK Yapalis Krian berakhir damai. Pihak orang tua siswa dan guru sepakat melakukan mediasi pasca video penamparan yang terjadi di sekolah pada Rabu (6/8) viral di media sosial.

"Jadi sudah diselesaikan damai. Dari orang tua siswa dan guru sudah sepakat damai setelah mediasi pada Sabtu (9/8)," kata Kepala SMK Yapalis Krian Vulkan Abriyanto kemarin (10/8). Proses tersebut juga dihadiri pengacara dan tokoh masyarakat. "Murid sudah meminta maaf kepada guru," imbuhnya.

Vulkan mengatakan, peristiwa itu terjadi di sekolahnya pada Rabu (6/8) sekitar pukul 15.30. Korban berinisial RA, 17, siswa kelas XII. Mulanya RA meminta izin ke toilet di jam pelajaran. Namun, remaja 17 tahun itu justru ke kantin untuk makan.

Seorang guru berinisial R, sekaligus wali kelas saat itu sedang lewat. Saat berpasangan dengan RA, guru tersebut langsung menegur. Akan tetapi RA malah naik ke lantai dua sambil membawa makanan. Menurutny, kondisi saat itu sudah sore, guru juga lelah sehingga emosi tidak bisa terkendali dan aksi keluyuran tersebut bukan yang pertama kali. Guru dan murid pun cekcok.

"Anak ini sudah beberapa kali melakukan hal serupa meski sudah dibina, mungkin saat itu gurunya sudah lelah," ujarnya. (eza/uzi)



TKP SMK Yapalis di Jalan Kyai Mojo, Dusun Jeruk, Jerukgamping, Krian, kemarin (10/8). Kasus guru menampar murid di sana sudah dimediasi.



AGUSTUS: Ibu-ibu RW 11 Desa Tosrobo, Kecamatan Taman, bermain Buntut Naga di Lapangan Wahana Wisata Edukasi Desa Tosrobo kemarin (10/8). Pemain terdepan harus menyentuh kain dari pemain lawan yang berada di posisi paling belakang.

### Peringati HUT RI dengan Balap Bakiak-Gobak Sodor

SIDOARJO - Kampung Lali Gadget (KLG) berkolaborasi dengan warga Perum Citra Harmoni Desa Tosrobo, Taman, menggelar berbagai lomba jelang peringatan hari kemerdekaan Indonesia di Lapangan Wahana Wisata Edukasi Desa Tosrobo kemarin (9/8). Yang ditambahkan banyak permainan tradisional.

"Kami gelar berbagai lomba mulai dari lari kelereg, pecah air, balap kodok sarung, balap bakiak, tarik tambang, bunut naga, dan gobak sodor," kata Founder KLG Achmad Irfandi. Lomba tersebut untuk memunculkan lagi nilai-nilai perjuangan yang edukatif namun tetap seru dan banyak tawa.

"Kami ingin mengembalikan kesenangan lomba yang dulu," katanya. Irfandi mengatakan bahwa ini juga upaya agar anak-anak bisa sejenak meletakkan HP dan gadgetnya. Ia ingin anak-anak generasi sekarang bisa tahu lomba yang dulu pernah dimainkan bapak-ibunya dulu. (eza/uzi)

### TPS Desa Pekarangan Mangkrak, Warga Buang Sampah Sembarangan



SUKODONO-Sampah banyak berakumulasi di sekitar hingga bangunan rumah-rumah Desa Pekarangan, Kecamatan Sukodono. Hal itu diduga akibat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) desa setempat tak lagi beroperasi. Fasilitas milik desa itu sudah lama tidak menerima pembuangan sampah dari warga.

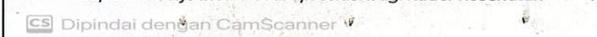
Kepala TPA Griyo Mulyo Jabon, Hajid Ari Hafid menyatakan bahwa TPST Pekarangan mati suri. "Sajak saya masuk DLHK pada 2023, tidak ada layanan sampah masuk dari Pekarangan," ucapnya.

Akliat tidak beroperasi, warga TPST, warga mencari alternatif pembuangan sampah. "Nggak enak banget, jenuh dan nggak enak," kata salah satu warga, ERM yang mengaku sudah lama tinggal di Desa Pekarangan.

### Pemkab Naikkan Honor Kader Kesehatan 100 Persen

Para kader ini hadir langsung di tengah masyarakat, memberikan edukasi, pendampingan, hingga tindakan awal. Kami naikkan honor kader kesehatan dari Rp 50.000 menjadi Rp 100.000 per bulan. Kenaikan ini diharapkan bisa meningkatkan semangat dan kesejahteraan mereka.

SUBANDI Bupati Sidoarjo bicara soal apresiasi bagi kader kesehatan



## Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Sidoarjo Raih Penghargaan Kabupaten Layak

### Anak (KLA) Peringkat Utama Tahun 2025



Progres Jatim.com, Sidoarjo – Kabupaten Sidoarjo kembali mengukir prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Peringkat Utama Tahun 2025. Penghargaan prestisius itu diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan

**PJ** PROGRESJATIM.COM  
Jendela Informasi Anda

dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi kepada Bupati Sidoarjo Subandi SH. MKn pada Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Pencapaian KLA peringkat Utama ini merupakan peningkatan signifikan dari raihan sebelumnya, yaitu di tingkat Nindya. Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi komprehensif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Juga, semakin diperkuat dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Perda tersebut menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya memenuhi dan melindungi hak-hak anak serta mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Subandi SH. MKn menyatakan rasa syukur dan bangga atas lompatan prestasi ini.

"Alhamdulillah, Setelah melalui berbagai tahapan dan evaluasi, Sidoarjo berhasil naik ke tingkat Utama KLA," ungkap Bupati Subandi.

Prestasi gemilang ini, lanjut dia, merupakan buah dari komitmen Pemkab Sidoarjo yang tertuang dalam Perda Perlindungan Anak dan Perda Pengarusutamaan Gender yang baru disahkan.

"Perda ini adalah wujud nyata keseriusan Pemkab Sidoarjo dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan kesetaraan gender," terangnya.

Lebih lanjut, Bupati Subandi menekankan bahwa keberhasilan ini juga merupakan hasil sinergi dan kolaborasi yang solid antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta berbagai stakeholder di Kabupaten Sidoarjo.

"Dukungan dan kerja sama dari semua pihak menjadi kunci utama keberhasilan ini. Dari perencanaan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi program-program KLA," tambahnya.

KLA Peringkat Utama merupakan penghargaan yang tertinggi dalam penilaian KLA.

Keberhasilan Sidoarjo meraih Peringkat Utama menunjukkan komitmen kuat Pemkab Sidoarjo dalam mewujudkan sistem pembangunan berbasis hak anak.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Penilaian KLA melibatkan berbagai indikator. Di antaranya, pemenuhan hak sipil anak, perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung tumbuh kembang anak.

Perlu diketahui bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menganugerahkan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2025 kepada 355 Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 22 kategori Utama, 69 kategori Nindya, 125 kategori Madya, dan 139 kategori Pratama. Penghargaan Provinsi Layak Anak (PROVILA) pun turut diberikan kepada 13 Provinsi yang telah melakukan upaya keras untuk menggerakkan Kabupaten/Kota di wilayahnya dalam mewujudkan KLA.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPAKB) Kabupaten Sidoarjo Heni Kristiani SPd MM menjelaskan, pengesahan Perda KLA telah memperkuat payung hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pro-anak. Dengan adanya Perda ini, Kabupaten Sidoarjo memiliki landasan yang lebih kuat untuk mengimplementasikan program-program. Seperti, pembentukan Forum Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), serta layanan pengaduan dan pendampingan bagi anak yang membutuhkan.

"Kami sangat berterima kasih atas visi dan dukungan penuh dari Bapak Bupati (Subandi) terkait perlindungan anak dan pengarusutamaan gender," ungkap Heni Kristiani.

Pencapaian cemerlang ini diharapkan dapat semakin memotivasi seluruh elemen masyarakat Sidoarjo untuk terus berkolaborasi dan meningkatkan upaya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Dengan begitu, Sidoarjo benar-benar menjadi Kabupaten Layak Anak seutuhnya. (GUS)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## **Bupati Subandi Sidak RTLH di Prambon, Dua Rumah Warga Simogirang Langsung Direnovasi**



Sidoarjo, centralberitanews.com – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Simogirang, Kecamatan Prambon, Kamis (7/8/2025). Dua rumah warga yang kondisinya memprihatinkan menjadi perhatian utama dalam kunjungan tersebut.

Kedua rumah yang disidak milik Mufid dan Sundusin. Kondisinya cukup mengkhawatirkan dengan atap yang hampir runtuh, dinding rapuh, dan tidak adanya fasilitas kamar mandi. Sidak tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Pemerintah Desa Simogirang yang mengajukan permohonan bantuan perbaikan.

“Melihat langsung kondisi di lapangan, kami bersama Baznas akan segera merenovasi rumah Pak Mufid dan Pak Sundusin bulan ini. Prioritas utama adalah perbaikan atap dan pembangunan jamban sehat. Kami ingin mereka segera tinggal di rumah yang lebih layak dan aman.” tegas Abah Subandi — sapaan akrab Bupati Sidoarjo.



Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa rumah keduanya sangat tidak layak huni, terutama saat musim hujan. Tidak adanya fasilitas sanitasi juga menjadi sorotan Bupati karena berisiko terhadap kesehatan keluarga.

Renovasi RTLH ini dilakukan melalui program bantuan Baznas Sidoarjo, yang menjadi bagian dari upaya Pemkab dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan. Program ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dari sisi kesehatan dan sosial.

Sundusin, salah satu penerima bantuan, tak kuasa menahan haru saat rumahnya dipastikan segera direnovasi setelah bertahun-tahun rusak.

"Rumah saya rusak sejak tahun 2017. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Subandi karena akhirnya rumah ini akan diperbaiki. Ini seperti mimpi bagi saya," tuturnya sambil menitikkan air mata.

Langkah cepat tanggap Bupati ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Sidoarjo dalam memastikan setiap warga miskin mendapatkan hak atas tempat tinggal yang layak. Program RTLH pun menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. (Son)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## **Betonisasi Jalan Gedangan-Betro Sudah Mencapai 94 Persen, Sebentar lagi Bisa Dinikmati**



Sidoarjo-Siarpos.com. Pengerjaan

betonisasi Jalan Gedangan-Betro terus dikebut. Pengerjaannya hampir 100 persen rampung. Progresnya saat ini mencapai 94 persen. Tinggal 6 persen lagi jalan beton Gedangan-Betro sepanjang 800 meter itu tuntas. Pagi tadi, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idavana meninjau progresnya. Kamis, (7/8).

Lewat Sidaknya, Wabup Hj. Mimik Idavana ingin memastikan pengerjaan proyek betonisasi Jalan Gedangan-Betro sesuai target. Tidak hanya itu, ia ingin pengerjaan jalan beton tersebut juga memperhatikan saluran air yang terpasang. Ia minta dilakukan pembersihan saluran air sebelum jalan beton tersebut difungsikan. Jangan sampai saluran pembuangan air tersebut tersumbat.



"Aku kepingin tahu dalamnya, bersih apa dangkal, nanti diangkat (penutup u-ditch)," pintanya.



Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan pengerjaan betonisasi Jalan Gedangan-Betro akan dikebut. Pengerjaannya akan dilembur sampai malam oleh kontraktor proyek. Ia ingin proyek jalan beton Gedangan-Betro tersebut selesai sesuai berakhirnya masa kontrak pengerjaannya tanggal 19 Agustus 2025 besok.

"Nanti malam dalam dua hari ini akan dikejar karena kontraknya sampai tanggal 19, sehingga nanti malam akan dilakukan beton kurus atau LC (Lean Concrete) lanjutan," ucapnya.

Dwi mengatakan masih ada 175 meter Jalan Gedangan-Betro yang belum selesai dibeton. Namun ia optimis seluruhnya akan terbeton dalam tiga hari kedepan. Sehingga ia meminta pelaksana proyek mengoptimalkan pengerjaannya disisa waktu 11 hari kedepan.

"Target 97 namun saat ini pertanggal 7 ini masih terealisasi 94,5, masih minus 2, semoga sisa waktu yang kurang 11 hari ini terkejar dengan baik," ujarnya.

Dwi juga mengatakan U-Ditch atau saluran drainase juga menjadi perhatiannya sebelum pengerjaan jalan beton Gedangan-Betro tuntas. Ia akan pastikan saluran pembuangan air itu bersih dari sisa-sisa material. Jangan sampai sebelum difungsikan sudah tersumbat oleh berbagai material sisa pengerjaan pembetonan jalan.

"Arahan ibu wakil bupati terkait drainase ini akan ditindaklanjuti oleh pelaksana karena waktu masih cukup," ujarnya. (Cak sokran)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Kok Bisa, Proyek Pokir Dewan di Tebel Sidoarjo Salah Titik



Anggota DPRD Sidoarjo, H. Deny Haryanto saat memberikan penjelasan di kantor desa Tebel (Foto: Wiwid Teguh)

Sidoarjo. Cakrawala.co — Forum Komunikasi Pemuda Tebel Bersatu (FKPTB) bersama LSM ALAS DPC Kecamatan Gedangan menyoal adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan proyek pavingisasi jalan di desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.

Menindaklanjuti hal itu, klarifikasi digelar Kamis, 7 Agustus 2025 di kantor desa setempat, dihadiri anggota DPRD Sidoarjo, H. Deny Haryanto, Achmad Muzayyin, Budi dari Dinas Perkim, pihak kontraktor, serta FKPTB dan LSM ALAS.

H. Deny Haryanto saat ditemui usai kegiatan tersebut menyampaikan akan mengantisipasi supaya kedepan kesalahpahaman titik lokasi kegiatan seperti di desa Tebel tidak terjadi kembali.

“Kedepannya mungkin bagi dewan, nanti akan koordinasi dengan pak lurah setempat. Pak saya ada pokir, pokirnya ini dititik ini. Dinas juga demikian, informasi ke dewan. Pak saya mau survei tolong koordinasikan tim jenengan untuk mengawal,” jelas politisi PKS ini.

Berdasarkan pantauan cakrawala.co, usai para pihak memberikan penjelasan secara bergantian sekaligus tanya jawab, akhirnya menghasilkan notulen atau catatan mengenai pertemuan. Adapun enam poin dalam notulen itu, yakni:

1. Akan dilakukan teguran kepada pelaksana kegiatan proyek paving di desa Tebel terhadap kesalahan keterlambatan pemasangan papan proyek kegiatan.
2. Disampaikan bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan Pokir tidak ada kewajiban untuk melibatkan masyarakat sekitar dalam pelaksanaannya.
3. Terhadap dugaan penyimpangan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk dilakukan lelang, sebagaimana diatur dalam Perpres pengadaan barang dan jasa kewajiban tersebut diwajibkan manakala nilai kegiatan diatas 400 juta.
4. Bahwa disepakati akan dilakukan usulan penambahan dana pada PAK dari anggaran Bappeda untuk menambah volumen paving di RT 006 RW 006 desa Tebel.
5. Bahwa apabila tidak ada penambahan dana pada PAK tahun 2025, maka akan dilakukan penyesuaian lokasi kegiatan paving di RT 002 RW 006 dialihkan kembali ke RT 006 RW 006.
6. Bahwa akan diupayakan kekurangan volume paving di RT 006 RW 006 melalui usulan Pokir tahun 2026.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Pro Kontra Penolakan LKPi APBD 2024, Dua Elemen Masyarakat Geruduk Kantor DPRD Sidoarjo



Dua elemen masyarakat, AWAS dan GNB saat ditemui oleh H. Abdillah Nasih, Ketua DPRD Sidoarjo dan Wahyu Lumaksono, anggota DPRD Sidoarjo.

SIDOARJO (Radarjatim.id) – Penolakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPi) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo masih menimbulkan pro kontra ditengah-tengah masyarakat.

Hal ini terlihat saat dua elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Warga Sidoarjo (AWAS) dan Gerakan Non Blok (GNB) mendatangi Kantor DPRD Sidoarjo, Kamis (7/8/2025).

Sebelum diterima oleh Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah beserta Wahyu Lumaksono anggota DPRD Sidoarjo, AWAS yang berjumlah sekitar 30 orang itu melakukan aksi unjuk rasa dan orasi di depan gerbang DPRD Sidoarjo.

"Kami mengkritik hubungan yang kurang harmonis antara Bupati dan DPRD. Kondisi ini memperlambat program Pemerintah Kabupaten (Pemkab red) Sidoarjo, dan berdampak langsung pada masyarakat serta pembangunan di Sidoarjo," kata Suryanto, Koordinator AWAS saat melakukan orasi di depan gerbang DPRD Sidoarjo.

Namun pihaknya mendukung penolakan LKPi APBD 2024 oleh DPRD Sidoarjo, karena sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tunoksi) sebagai anggota legislatif.

Akan tetapi, AWAS meminta kepada DPRD Sidoarjo untuk menjabarkan kepada masyarakat terkait alasan penolakan atau tidak setujuinya LKPi APBD 2024.

"Perbedaan tajam antara DPRD dan eksekutif dalam menyikapi LKPi berpotensi menyebabkan stagnasi kebijakan. Dan, tersendatnya penggunaan anggaran yang bisa menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA, red)," terangnya. Setelah melakukan orasi, AWAS ditemui oleh Abdillah Nasih dan Wahyu Lumaksono di ruang sidang yang berada di lantai 2 komisi-komisi DPRD Sidoarjo.

Abdillah Nasih dan Wahyu Lumaksono mendengar serta menjawab satu persatu pertanyaan maupun pernyataan yang disampaikan oleh AWAS sekitar 1 jam lamanya.

Kemudian, Abdillah Nasih dan Lumaksono menemui GNB di ruang transit yang berada di sisi utara ruang paripurna DPRD Sidoarjo.



Luddy Eko, salah satu aktivis yang tergabung dalam GNB meminta kepada DPRD Sidoarjo untuk segera menghentikan persetujuan dengan Pemkab, khususnya dengan Bupati Sidoarjo. Karena akan berdampak kurang baik terhadap pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Bahkan wartawan senior itu sedikit mengutip sajak dari KH. Mustofa Bisri atau Gus Mus yang berjudul 'Kau Ini Bagaimana' atau 'Aku Harus Bagaimana'.

"Kau ini bagaimana, kau suruh aku memilih kamu. Sekarang sudah kupilih, kau berbuat semaumu. Yang jadi pertanyaannya, rencana-pendanaannya apakah ini sampai kapan, cak?" tanya Luddy kepada Abdillah Nasih dan Wahyu Lumaksana. Ia merasa khawatir kalau persetujuan antara eksekutif dan legislatif terus berlanjut sampai pembahasan APBD tahun 2026, tentu rakyat Sidoarjo yang akan dirugikan.

"Kalau ini berlanjut sampai pembahasan APBD (2026, red), *mbak usane benar tilu tibehe iki*" ucapnya. Dr. Uhaidillah, akademisi yang tergabung dalam GNB menyampaikan bahwa tidak adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terkait LKPi APBD 2024 menyebabkan munculnya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kabupaten Sidoarjo.

Secara aturan bahwa Perkada itu sah, ketika Peraturan Daerah (Perda) itu tidak bisa disepakati antara pihak eksekutif dengan legislatif. Karena produknya berbeda, maka muatannya juga berbeda.

"Kalau Perda itu menjadi sesuatu yang optimal, dari sisi perencanaan, pendanaan dan sebagainya. Tapi dengan Perkada ini, ya tentu tidak semaksimal Perda," sampainya.

Menurut Uhaidillah bahwa dengan Perkada hanya bisa memuat program-program pembangunan yang bersifat konservatif saja. Sedangkan program-program pembangunan yang inovatif apalagi ekspansif untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo tidak bisa dilakukan atau dieksekusi.

"Harapan kita, apapun yang menjadi alasan, temuan ataupun catatan sehingga Perda itu tidak bisa disepakati oleh dewan dapat memberikan kebaikan. Memberikan evaluasi yang benar-benar kuat kepada pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan," terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menuturkan bahwa pihaknya memberikan apresiasi kepada seluruh komponen atau elemen masyarakat yang berani menyampaikan pendapat dan memberikan masukan kepada institusi yang dipimpinnya.

"Ini luar biasa, dan ini harus kita apresiasi. Berarti kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Sidoarjo benar-benar hidup," tuturnya.

Pria yang akrab disapa Cak Nasih itu menilai terjadinya pro kontra ditengah-tengah masyarakat terhadap setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh eksekutif dan legislatif adalah hal yang wajar.

Ia memastikan bahwa penolakan atau tidak disetujuinya LKPi APBD 2024 oleh DPRD Sidoarjo merupakan salah satu tugas legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemkab Sidoarjo.

"Apa yang terjadi kemarin itu murni sebagai salah satu tugas kami dalam melakukan pengawasan atau kontrol kepada eksekutif," jelasnya.

Diterangkan oleh Cak Nasih bahwa pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2025 tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena Perkada dengan PAK APBD 2025 itu berbeda.

Menurutnya bahwa nota pembahasan PAK APBD 2025 sudah masuk dan sudah dibahas atau disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo.

"Setelah itu kita bahas sama-sama lewat komisi-komisi. Dan, minggu kemarin kita bahas antara Banggar (Badan Anggaran, red) dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red) untuk pembahasan PAK ini," terangnya.

Ia merasa optimis kalau pembahasan PAK APBD 2025 ini bisa berjalan dengan baik, karena berdasarkan peraturan yang ada bahwa pembahasan PAK APBD dibatasi sampai akhir bulan September 2025 ini.

"Kita juga *maebut* untuk pembahasan PAK, karena berhimpitan dengan pembahasan KUA-PPAS tahun 2026," pungkasnya. (mams)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## **Membludak, Kejari Sidoarjo Layani Ribuan Pelanggar Tilang Hasil Operasi Patuh Semeru 2025**



**BIDIKNASIONAL.com** Kasipidum Kejari Sidoarjo, Hafidi, saat layani proses ambil tilang. (Foto: Teddy Syah/BN.com)

**SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com** – Ribuan warga mendatangi **Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo** untuk mengurus denda tilang hasil Operasi Patuh Semeru 2025 yang berakhir, pada 24 Juli lalu.

Kasipidum Kejari Sidoarjo, Hafidi, menyebutkan lonjakan ini dipicu oleh hasil sidang pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

"Membludaknya pelanggaran ini oleh karena adanya hasil Operasi Patuh Semeru 2025 yang berakhir tanggal 24 Juli kemarin," ujarnya, Jumat (8/8/2025).

Hafidi menjelaskan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, jumlah pelanggar yang diputus verstek untuk hari ini mencapai 6.906 orang.

"Ini untuk minggu kedua. Minggu kemarin itu sekitar 2.600, minggu ini sekitar 6.906 pelanggar," tambahnya.

Sebagai langkah antisipasi sejak awal, Kejari Sidoarjo telah menyiapkan langkah dengan mengumumkan bahwa pengambilan berkas tilang bisa diambil lain hari.



"Kita sudah mengantisipasi ini semua melalui media sosial kami, kemudian juga woro-woro melalui teman-teman, media sosial yang ada, Instagram, Facebook, dan lain-lain," jelasnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu berdesakan pada hari yang sama dengan tanggal yang tertera di surat tilang.

"Akun-akun resmi kami mengimbau bahwa pengambilan tilang itu tidak hanya tercantum hari ini saja, melainkan bisa di hari-hari lain di hari-hari kerja dan tanpa adanya pungutan tambahan atau biaya tambahan," tegas Hafidi.

Selain melalui media sosial, edukasi juga dilakukan secara langsung di lapangan. "Kami juga mengedukasi di jalan-jalan, kita juga sudah pasang banner untuk mengantisipasi membludaknya itu," tambahnya.

Sejak loket dibuka pukul 07.30 WIB, antrean warga terus berdatangan. "Sampai dengan jam 11, diperkirakan Kejari Sidoarjo sudah tangani sekitar 2.000 pelanggar," pungkasnya.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Tidak Terpengaruh Polemik, DPRD Sidoarjo Gelar Paripurna Rencana Pembahasan PAK APBD Tahun 2025



Sidoarjo (republikjatim.com) - Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo akhirnya tetap melaksanakan Rapat Paripurna tentang Rencana Pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kamis (31/07/2025). Rapat ini menandakan jika rencana pembahasan PAK tetap dilaksanakan meski ada polemik dan beda pendapat diantaranya kalangan eksekutif Pemkab Sidoarjo.

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo berharap melalui PAK ini, dapat menghasilkan output pengelolaan dan manajemen anggaran untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Padahal, sebelumnya Asisten Pemerintahan Pemkab Sidoarjo, M Ainur Rahman didampingi Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo beserta jajaran beserta Tim Anggaran (Timgar) lainnya menyatakan tidak akan ada PAK dalam APBD Tahun 2025. Alasannya, lantaran ada penolakan pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo melalui Pandangan Akhir (PA) sebagian besar fraksi di DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam rapat paripurna sebelumnya.

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H Abdillah Nasih mengatakan pihaknya tidak ingin masuk maupun terjebak dalam polemik antara bisa atau tidaknya melaksanakan PAK pada APBD Tahun 2025. Hal ini, menyusul keputusan ditolaknya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2024 Bupati Sidoarjo oleh sebagian besar fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Alasan politis PKB Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) senior ini, lantaran kedua hal itu dinilai berbeda. Pihaknya, optimis PAK APBD Tahun 2025 tetap bisa diproses dan direalisasikan.

"Karena tugas itu harus sama-sama dilaksanakan legislatif berdasarkan fungsinya sebagai lembaga legislasi, penganggaran maupun sebagai lembaga pengawasan. Bagi kami, keputusan sidang paripurna menolak LPP APBD Tahun 2024 itu keputusannya sudah final. Apalagi, sudah diputuskan dalam rapat paripurna sebelumnya. Kami pun sudah melakukan cross check ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, pihak eksekutif (Pemkab Sidoarjo) juga sudah mengirim draf Peraturan Kepala Daerah (Perkada) ke Gubernur Jatim. Kalau pun nantinya, dipandang perlu dilakukan revisi

atau penempurnaan berkas Perkada, maka hal itu sudah menjadi tugasnya pihak eksekutif bukan di legislatif (dewan)," ujar H Abdillah Nasih kepada republikjatim.com, Jumat (08/08/2025).



Sedangkan soal rencana keputusan pembahasan PAK APBD Tahun 2025, bagi politisi senior yang akrab disapa Cak Nasih ini, menjadi salah satu upaya meningkatkan out put dalam pengelolaan dan manajemen keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo ke depan. Bahkan, Nasih menilai regulasi yang menyatakan pengesahan PAK harus didahului dengan Peraturan Daerah (Perda) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati itu, juga masih memiliki tafsir yang beragam.

"Bagi kami, pelaksanaan PAK itu sangat krusial. Karena pelaksanaan PAK itu sudah diatur undang-undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, keputusan sidang paripurna kemarin, dasarnya juga ada pada nota surat masuk dari Bupati Sidoarjo," ungkap Cak Nasih yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Sidoarjo ini.

Berdasarkan mekanismenya, kata Nasih DPRD Kabupaten Sidoarjo berkewajiban merespon nota surat masuk yang berisi permohonan pembahasan PAK itu. Hal ini sebagai proses dalam mengawali pembahasan di tingkat pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo. Kemudian disampaikan dan dibahas di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Sidoarjo hingga dibahas bersama antara Tim Anggaran (Timgar) Pemkab dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sidoarjo hingga akhirnya melahirkan keputusan penyusunan Rencana Kerja (Renja).

"Nah, semua prosedur itu, kami lalui sesuai peraturan dan perundang-undangan. Di dalam proses pembahasan PAK itu, kami masih memiliki batas waktu 30 hari untuk menyelesaikan hingga persetujuan PAK APBD Tahun 2025. Semua proses akan kami lalui mudah-mudahan tanpa kendala. Insyaallah semua akan berjalan lancar sesuai rencana sebelumnya atau dalam PAK di tahun-tahun sebelumnya," tegasnya.

Sedangkan anggapan hasil PAK APBD Tahun 2025 bakal muspro atau tidak bisa disahkan karena dikaitkan LPP Bupati Sidoarjo atas APBD Tahun 2024 dan langsung bakal menggunakan Perkada, Cak Nasih tidak ingin berasumsi soal penafsiran kalangan eksekutif (Pemkab) Sidoarjo itu. Bagi Cak Nasih, apa yang terjadi ke depan merupakan hasil keputusan bersama yang sudah melalui beberapa tahapan dan proses.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

"Soal anggaran sebenarnya, kita tidak boleh berandai andai. Apalagi, soal apakah itu hasilnya bisa disahkan atau tidak?. Itu urusan nanti. Yang terpenting sekarang ini mekanisme dan prosedurnya telah kami lalui dengan benar hingga pelaksanaan Rapat Paripurna kemarin itu," ungkapnya.



Apalagi dalam sidang paripurna itu, lanjut Cak Nasih yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo ini dalam sidang paripurna kemarin dihadiri 30 anggota DPRD Sidoarjo. Materinya sidang pertama agendanya Pembacaan Nota Surat Masuk dan Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Sidoarjo terhadap Raperda tentang PAK APBD 2025.

"Sedangkan materi sidang kedua adalah Pembacaan Surat Masuk dan Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2026," jelas mantan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo periode 2019-2024 ini.

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo III, H Kavan SH. Menurutnya, tahapan pembahasan PAK APBD Tahun 2025 itu sudah dijadwalkan berlangsung hingga September 2025 mendatang. Terkait keputusan akhir apakah disahkan atau tidak, hal itu menurutnya bakal diputuskan nanti.

"Untuk pengambilan keputusan itu nanti. Sekarang ini yang penting proses pembahasannya tetap berjalan. Apalagi, hingga kini hasil konsultasi Pemkab Sidoarjo ke Kemendagri RI soal PAK Tahun Anggaran 2025 ini belum diterima. Kami memperkirakan hal ini butuh waktu karena penolakan LPI APBD Bupati Sidoarjo merupakan hal yang relatif baru di Kemendagri. Sementara kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Proses dan timeline PAK tetap kami dilanjutkan," papar mantan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo ini.



Bagi politisi senior Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo ini, di dalam PAK APBD Tahun 2025 ini, terdapat beberapa perubahan peningkatan pendapatan. Akan tetapi, perubahan itu tidak terlalu signifikan. Artinya jika ada pembahasan maka hal ini menunjukkan komitmen bersama antara eksekutif (Pekab) dan legislatif (DPRD) Sidoarjo.

"PAK sangat penting dan krusial untuk direalisasikan. Karena di Sidoarjo ini masih ada beberapa sektor yang membutuhkan penambahan belanja. Misalnya soal jalan rusak. Kalau kemarin perbaikannya masih belum bisa maksimal, nanti dimaksimalkan di dalam PAK. Selain itu, juga ada kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), rehab dan perbaikan sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), mengatasi masalah langganan banjir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan dan stunting," ungkap politisi yang dua kali menjabat Wakil Ketua DPRD Sidoarjo ini.

Begitu juga soal pembahasan di anggaran Tahun 2026, kata Kavan Pekab Sidoarjo harus meningkatkan pendapatan daerahnya. Alasannya, karena masih banyak peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan cara mencapainya itu. Misalnya dengan mengurangi sejumlah belanja yang tidak penting atau dengan mencari sumber-sumber dan potensi pendapatan lainnya.

"Biasanya dalam pembahasan itu, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau eksekutif menggunakan parameter target minimalis. Karena kekhawatiran kemungkinan target tidak bisa tercapai. Tapi, kami yakin jika di Tahun 2025 semua target sudah terlampaui semua, maka di Tahun 2026 target pendapatan harus tercapai semua. Kami optimis kalau target pendapatan bisa dicapai dengan banyak cara untuk merealisasikannya. Seperti pajak rumah makan, pajak resto, pajak parkir dan masih banyak potensi pajak yang bisa dimaksimalkan untuk mendorong PAD," tandas politisi asal Kecamatan Prambon ini.

Sementara di sisi lain, pihak eksekutif (Pekab) Sidoarjo masih menunggu hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persoalan PAK APBD Tahun 2025 ini.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Sidoarjo, M Ainur Rahman mengakui pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kemendagri sebagai hasil konsultasi yang telah dilakukan sebelumnya.

"Kami tidak mau berspekulasi soal boleh atau tidaknya PAK digelar. Insyaallah surat dari Kemendagri akan turun, kita tunggu saja hasilnya seperti apa penjelasan dan dalilnya," ucap Ainur Rahman yang juga menjabat Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pekab Sidoarjo ini," ucapnya.

Sedangkan dalam penyampaiannya Bupati Sidoarjo, Subandi menjabarkan dalam pengelolaan anggaran pemerintah harus dilakukan dengan unsur kehati-hatian dan harus mematuhi regulasi yang ada. Terkait PAK ini pihaknya menargetkan ada tambahan sekitar Rp 3,2 miliar. Jika sebelumnya target kekuatan APBD Tahun 2025 sebesar Rp 5.428.354.730.802 menjadi Rp 5.431.576.849.369.

"Dalam Raperda PAK APBD 2025 ini, tentunya kita berharap dapat dilanjutkan pembahasannya hingga targetnya nanti bisa segera ditetapkan," pungkas Bupati Sidoarjo asal Kecamatan Sedati ini. Adv/Ary/Waw



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Proyek Pokir DPRD Sidoarjo di Desa Tebel Senilai Rp349 Juta Tak Sesuai Lokasi



**TIMES** INDONESIA

Lokasi pembangunan paving di Jl. Tebel Indah Balong Macan Desa Tebel atas usulan pikir anggota DPRD Sidoarjo. (FOTO: Syaiful Bahri/TIMES Indonesia)

Kecil Besar

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Pembangunan jalan paving di Desa Tebel Kecamatan Gedangan salah titik lokasi. Proyek ini merupakan usulan pokok pikiran (pikir) dari anggota DPRD Sidoarjo. Yaitu Deny Haryanto dari Fraksi PKS dan Achmad Muzayyin dari Fraksi PKB. Paket 1 Pembangunan jalan paving di Jl. Tebel Indah Balong Macan Desa Tebel paket 2 di RT.06 RW.06 Desa Tebel Kecamatan Gedangan.

Kepala Desa Tebel H. Trivono menjelaskan pembangunan paving tersebut seharusnya di dua lokasi berbeda. Yang usulan dari Achmad Muzayyin di Jl. Tebel Indah Balong Macan. Kondisi jalannya memang sudah rusak.



"Karena memang disitu dekat dengan rumah pak Muzayyin." katanya saat dikonfirmasi di Balai Desa Tebel, Jumat (8/8/2025).

Usulan pokir dari anggota DPRD Sidoarjo, Deny Haryanto di RT 06 RW 06 Desa Tebel. Namun tidak dikerjakan di lokasi yang sudah ditentukan. Tapi justru dibangun di area Tebel Indah Balong Macan. Semua proses pembangunannya sudah selesai.

Kades Trivono menjelaskan kasus salah titik pembangunan paving tersebut sudah dilakukan mediasi di Balai Desa kemarin yang dihadiri Deny Haryanto, Achmad Muzayyin dan dinas terkait.

"Sudah ada mediasi, katanya akan diganti setelah ada PAK (APBD 2025)," jelasnya.

Dari penelusuran TIMES Indonesia diketahui bahwa pembangunan paving di Desa Tebel itu dikerjakan oleh CV. Sumber Jati dengan nilai kontrak Rp349.363.027,32.

Dikonfirmasi secara terpisah, anggota DPRD Sidoarjo Achmad Muzayyin mengatakan adanya salah titik lokasi pembangunan paving hanya miskomunikasi semata.

Dia mengaku bahwa pembangunan paving tersebut berada di RW yang sama. "Hanya miskomunikasi itu saja, tidak ada masalah," ucapnya.

Untuk pembangunan paving di berada Jl. Tebel Indah Balong Macan, dalam dokumen perencanaan lelang paket kedua ada di RT 06 RW 06 Desa Tebel.

Salah satu kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan di Balai Desa Tebel disepakati, bahwa apabila tidak ada penambahan dana pada PAK tahun 2025, maka akan dilakukan penyesuaian lokasi kegiatan paving di RT 02 RW 06 dialihkan kembali ke RT 06 RW 06. (\*)

## Sidoarjo Kabupaten Layak Anak Peringkat Utama

### Sidoarjo, Memorandum

Kabupaten Sidoarjo kembali mengukir prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Peringkat Utama Tahun 2025. Penghargaan itu diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi kepada Bupati Sidoarjo Subandi pada Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2025 di Jakarta, Jumat (8/8).



Bupati Sidoarjo H Subandi menerima penghargaan dari Menpan PPPA Arifatul Choiri Fauzi.

Pencapaian KLA peringkat utama ini merupakan peningkatan signifikan dari raihan sebelumnya, tingkat Nindya. Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi komprehensif Pemkab Sidoarjo. Juga, semakin diperkuat dengan disahkannya Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Perda tersebut menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya memenuhi dan melindungi hak-hak anak serta mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan rasa syukur dan bangga atas lompatan prestasi ini. "Alhamdulillah. Setelah melalui berbagai tahapan dan evaluasi, Sidoarjo berhasil naik ke peringkat utama KLA," ujar Subandi.

Prestasi gemilang ini, lan-

jut dia, merupakan buah dari komitmen Pemkab Sidoarjo yang tertuang dalam Perda Perlindungan Anak dan Perda Pengarusutamaan Gender yang baru disahkan. "Perda ini adalah wujud nyata keseriusan Pemkab Sidoarjo dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan kesetaraan gender," jelasnya.

Lebih lanjut, Subandi menekankan bahwa keberhasilan ini juga merupakan hasil sinergi dan kolaborasi yang solid antara seluruh OPD terkait serta berbagai stakeholder. "Dukungan dan kerjasama dari semua pihak menjadi kunci utama keberhasilan ini. Dari perencanaan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi program-program KLA," tambahnya.

KLA Peringkat Utama merupakan penghargaan yang tertinggi dalam penilaian KLA.

Keberhasilan Sidoarjo meraih Peringkat Utama menunjukkan komitmen kuat Pemkab Sidoarjo dalam mewujudkan sistem pembangunan berbasis hak anak.

Penilaian KLA melibatkan berbagai indikator. Di antaranya, pemenuhan hak sipil anak, perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung tumbuh kembang anak.

Perlu diketahui bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menganugerahkan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2025 kepada 355 Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 22 kategori Utama, 69 kategori Nindya, 125 kategori Madya, dan 139 kategori Pratama.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPAKB) Kabupaten Sidoarjo Heni Kristiani menjelaskan, pengesahan Perda KLA telah memperkuat payung hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pro-anak.

Dengan adanya regulasi itu, Kabupaten Sidoarjo memiliki landasan yang lebih kuat untuk mengimplementasikan program-program. Seperti, pembentukan forum anak, pusat pembelajaran keluarga (Puspaga), serta layanan pengaduan dan pendampingan

bagi anak yang membutuhkan. "Kami sangat berterima kasih atas visi dan dukungan penuh dari Bapak Bupati (Subandi) terkait perlindungan anak dan pengarusutamaan gender," ujarnya.

Pencapaian cemerlang ini diharapkan dapat semakin memotivasi seluruh elemen masyarakat Sidoarjo untuk terus berkolaborasi dan meningkatkan upaya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bag tumbuh kembang anak. Dengan begitu, Sidoarjo benar-benar menjadi Kabupaten Layak Anak seutuhnya. (adv/kri/jok/epe)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Syukuran 27 tahun IJTI di Sidoarjo.

## Syukuran 27 Tahun IJTI Jurnalis TV Dituntut Matang dan Dewasa

### Sidoarjo, Memorandum

Menjunjung tinggi jurnalisme positif untuk memperkuat kemerdekaan pers dan kedaulatan informasi nasional, jurnalis TV saat ini harus bisa lebih matang dan dewasa dalam pemberitaan. Plus, harus dapat mengedukasi masyarakat. Harapan itu disampaikan Wakapolresta Sidoarjo AKBP M Zainur Rofiq saat menghadiri syukuran 27 tahun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Sekretariat Korda Sidoarjo, Sabtu (9/8).

Menurut mantan kapolres Lumajang dan Madiun itu, jurnalis TV saat ini tidak hanya dituntut untuk memberitakan suatu peristiwa atau kejadian secara cepat dan lugas. Namun juga harus menyajikan pemberitaan yang mengedukasi. Untuk mendukung itu, Polresta Sidoarjo siap berkolaborasi dan bersinergi lebih optimal.

Khususnya dalam menyampaikan informasi kinerja Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan sesuai Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. "Semoga di usia ke-27 ini, jurnalis TV yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia terus berkolaborasi dan bersinergi dengan Polri dalam mewujudkan pemberitaan yang dapat mengedukasi masyarakat," ujarnya.

Ketua IJTI Korda Sidoarjo Pramono Putra menegaskan, siap mewujudkan hal itu dengan tetap memperhatikan kaidah jurnalistik dalam mewujudkan jurnalisme positif. "IJTI di Sidoarjo siap berkolaborasi dan memperkuat sinergi dengan Polri dan pemerintah dalam pemberitaan yang bisa mengedukasi masyarakat," ujarnya. (san/epe)

**MEMORANDUM**  
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Lomba Mancing Berhadiah Rp 102 Juta Diserbu Warga

TANGGULANGIN-Pemdes Boro Kecamatan Tanggulangin kembali menggelar lomba mancing ikan lele, Minggu (10/8). Hadiahnya luar biasa. Yakni total Rp 102 juta. Kegiatan tersebut sukses menarik perhatian warga.

Dalam pantauan Radar Sidoarjo, ribuan warga memadati lokasi lomba. Ada yang sekadar menonton maupun memberikan semangat ke peserta mancing.

Para pemancing juga tampak antusias mengikuti lomba. Mereka saling berebut ikan di sungai yang menjadi arena.

Lomba ini digelar mulai pukul 08.00 hingga 13.00 di Sungai Desa Boro RT 10 RW 03. Lomba hanya untuk warga ber-KTP Desa Boro.

Sekretaris Desa Boro, Fajar Mardianto mengatakan, pihaknya memilih lomba mancing untuk memanfaatkan potensi alam. Potensi tersebut Desa Boro telah anggar itu sendiri.

"Tentunya untuk menyemarakkan perayaan kemerdekaan HUT RI ke-80," ucapnya kepada Radar Sidoarjo.



**ANTUSIASME LUAR BIASA:** Para peserta antusias mengikuti lomba mancing di Sungai Desa Boro.

"ajaibnya lomba mancing menjadi ajang silaturahmi warga. Karena itu kegiatan itu cukup menyenangkan warga. "Selain gratis, hadiahnya juga fantastis," ujarnya.

"Peserta yang menangkap ikan lele beranda khusus dari panitia berhak membawa pulang hadiah khusus," imbuhnya.

Salah satu peserta, Hari Santoso

mengaku senang mengikuti lomba. Apalagi kegiatan ini sesuai dengan hobinya.

Dia merasa kalah atau menang bukan masalah. Apalagi, lombanya di-

gelar tanpa dipungut biaya atau gratis dan hasil ikan boleh dibawa pulang.

"Bahkan ikan yang didapat juga boleh dibawa pulang," pungkasnya. (sai/vga)

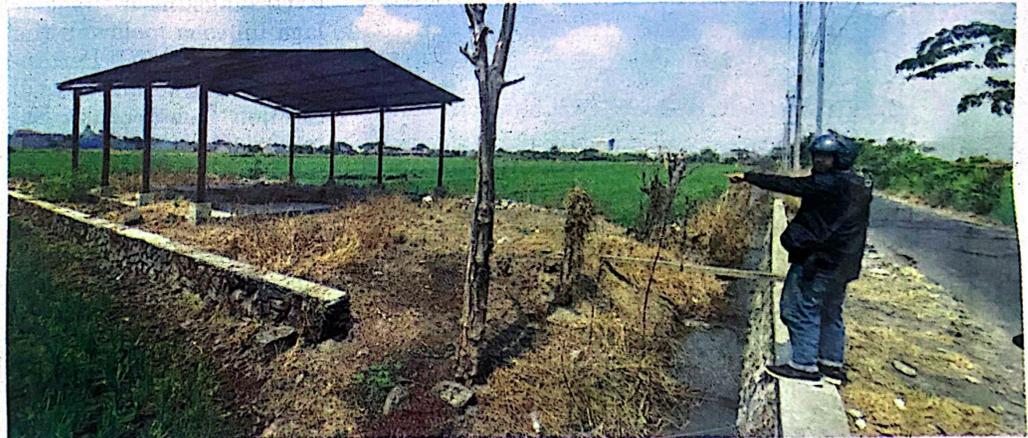


## TPS Desa Pekarungan Mangkrak, Warga Buang Sampah Sembarangan

**SUKODONO**-Sampah banyak berserakan di sawah hingga bantaran sungai Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono. Hal itu diduga akibat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) desa setempat tak lagi beroperasi. Fasilitas milik desa itu sudah lama tidak menerima pembuangan sampah dari warga.

Kepala TPA Griyo Mulyo Jabon, Hajid Arif Hidayat membenarkan bahwa TPST Pekarungan mati suri. "Sejak saya masuk DLHK pada 2023, tidak ada layanan sampah masuk dari Pekarungan," ucapnya.

Akibat tidak beroperasinya TPST, warga mencari alternatif pembuangan sampah. Sebagian memakai jasa vendor swasta, namun tak sedikit yang membuang sampah sembarangan. "Keli-



M SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

**MATI SURI:** TPS Desa Pekarungan tampak sudah lama tidak aktif.

hatannya karena tutup itu akhirnya dibuang ke mana-mana, termasuk di sawah dan sungai," terangnya.

DLHK sendiri mempunyai program pembersihan sungai mulai dari Jumbut hingga barat, tepatnya di Sungai Ketawang. Harapannya, TPS

atau TPST yang tidak aktif bisa kembali dihidupkan, termasuk di Pekarungan.

Hajid menjelaskan, sampah dari Pekarungan yang mengalir ke barat akan bermuara di Desa Jumput Rejo. Karena itu, pengecekan lapangan akan dilaku-

kan untuk memastikan kondisi TPST dan alur pembuangan sampah warga.

"Kalau bisa dikelola desa atau KSM tentu bagus, kalau tidak, harus ada opsi lain seperti dikelola DLHK langsung," katanya. (sai/vga)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Honor Kader Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo Naik

### Sidoarjo, Bhirawa

Honor Kader Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo, dinaikkan oleh Bupati Sidoarjo, Subandi, sebesar 100 persen. Dari 50 ribu menjadi 100 ribu perbulan.

Janji tersebut disampaikan Subandi, ketika membuka kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Kamis (7/8) akhir pekan lalu.

Kegiatan Germas kali ini diikuti oleh 150 kader kesehatan dan petugas puskesmas dari berbagai desa dan kelurahan.

Para kader kesehatan Sidoarjo, dalam acara itu, sempat mendapatkan pelatihan serta pembekalan teknis untuk menangani berbagai masalah kesehatan di masyarakat.

Mulai dari pemantauan ibu hamil, balita, penanganan gizi buruk, hingga penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Germas di Kabupaten Sidoarjo diharapkan Subandi bisa berjalan maksimal. Tidak hanya edukasi hidup sehat, tetapi juga pelayanan kesehatan. Termasuk mengejar cakupan Universal Health Coverage (UHC) dari 78 persen menjadi 98 persen. Harapannya, warga Sidoarjo cukup menunjukkan KTP saja saat berobat.

Menurut Subandi, menaikkan honor untuk Kader Kesehatan tersebut sebagai apresiasi dari Pemkab Sidoarjo atas dedikasi para kader kesehatan, yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan kesehatan di tingkat desa.

Selain menaikkan honor, Pemkab Sidoarjo juga memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan, untuk seluruh kader Posyandu di Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Subandi peran para kader kesehatan tersebut penting dalam menyukseskan program Germas di Sidoarjo. Mulai dari edukasi pola hidup bersih dan sehat, ajakan konsumsi buah dan sayur, cek kesehatan rutin, hingga kampanye anti rokok dan anti alkohol. [kus.dre]

HARIAN  
**Bhirawa**  
Wala Sidiyasa Bhiru Wastu

## Polresta Sidoarjo Gelar Gerakan Pangan Murah

Sidoarjo—HARIAN BANGSA

Polresta Sidoarjo Polda Jatim bersama stake holder terkait, melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) menyeluruh di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing menyampaikan, bahwa Gerakan Pangan Murah yang dilakukan merupakan sebagai wujud kehadiran Polri untuk Masyarakat.

Gerakan pasar murah ini sudah dimulai pada hari Jumat (8/8/2025) yang lalu dengan melibatkan seluruh Polsek yang ada di jajaran Polresta Sidoarjo Polda Jatim.

“Kami hadir untuk masyarakat bukan hanya untuk Kamtibmas dan penegakan hukum namun juga dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan ketersediaan pangan, khususnya beras di tengah fluktuasi harga pasar,”



**Polresta Sidoarjo ketika menggelar gerakan pangan murah yang disambut antusias warga.** Foto: tribun

kata Kombes Pol Christian Tobing, Minggu (10/8/2025).

Untuk harga beras jenis SPHP di GPM ini dipatok dibawah harga eceran tertinggi. Untuk distribusinya kata Kombes Christian telah dilakukan serentak oleh Polresta Sidoarjo dan 18 polsek jajaran dengan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dan Babin-

sa agar dapat menysasar ke warga yang membutuhkan di tingkat pelosok desa

Gerakan Pangan Murah menjadi langkah strategis jangka pendek untuk menahan laju inflasi pangan serta memperkuat sinergi antara pemerintah, Polri, dan lembaga pangan dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. (trc/ns)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



LOETFI/DUTA

Istri Bupati Sidoarjo bersama 5 ribu anak deklarasikan 1 tahun PAUD Pra SD, Sabtu (9/8/25)

## Deklarasikan PAUD Pra SD

**SIDOARJO** - Sebanyak 5 ribu anak Sidoarjo memperingati Hari Anak Nasional di Lapangan Pasmar 2 Sidoarjo, Sabtu (9/8/25). Ribuan anak yang datang bersama bunda PAUD masing-masing itu berasal dari berbagai lembaga PAUD dan TK se-Kabupaten Sidoarjo.

Bunda PAUD Kabupaten Sidoarjo, Hj. Sriatun Subandi, hadir di tengah-tengah mereka. Kehadiran istri Bupati Sidoarjo, H. Subandi, itu sekaligus untuk mendeklarasikan 1 tahun PAUD Pra SD bersama seluruh pihak.

Dalam deklarasinya, dinyatakan dukungan penuh terhadap 1 tahun PAUD Pra SD sebagai dasar hak anak dan pondasi penting menuju generasi Indonesia yang bermutu. Deklarasi digaungkan bersama Wakil Komandan Pasmar 2 Kol Mar Anggorojati, Kepala Kemenag Sidoarjo Mufi Imron, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirto Adi. Seluruh bunda PAUD se-Kabupaten Sidoarjo yang hadir ikut serta dalam deklarasi tersebut.

"Kami bersama pemerintah, bunda PAUD, pendidik, orang tua, dan anak-anak kami berkomitmen mewujudkan layanan PAUD yang inklusif dan bermutu. PAUD dulu, SD kemudian, masa depan gemilang," ucap Bunda PAUD Kabupaten Sidoarjo Hj. Sriatun Subandi bersama-sama.

Bunda PAUD Sidoarjo, Hj. Sriatun Subandi, mengatakan peringatan Hari Anak bukan hanya seremoni, melainkan momen penting untuk menguatkan komitmen bersama dalam pemenuhan hak-hak anak.

"Mereka harus dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang," ucapnya.

Ia menyebut Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema "Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045" dengan tagline inspiratif "Anak Indonesia Bersaudara". Tema tersebut, menurutnya, memiliki makna mendalam.

"Anak-anak hari ini adalah generasi emas penerus bangsa yang akan memegang estafet kepemimpinan menuju 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu Indonesia Emas 2045," ujarnya. ●Loe





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Pemkab Naikkan Honor Kader Kesehatan 100 Persen



Para kader ini hadir langsung di tengah masyarakat, memberikan edukasi, pendampingan, hingga tindakan awal. Kami naikkan honor kader kesehatan dari Rp 50.000 menjadi Rp 100.000 per bulan. Kenaikan ini diharapkan bisa meningkatkan semangat dan kesejahteraan mereka.”

**SUBANDI**

*Bupati Sidoarjo bicara soal apresiasi bagi kader kesehatan*

CS Dipindai dengan CamScanner

## Jawa Pos

## Guru Tampar Siswa SMK di Krian Berakhir Damai

**SIDOARJO** - Aksi guru menampar siswa di SMK Yapalis Krian berakhir damai. Pihak orang tua siswa dan guru sepakat melakukan mediasi pasca video penamparan yang terjadi di sekolah pada Rabu (6/8) viral di media sosial.

"Jadi sudah diselesaikan damai. Dari orang tua siswa dan guru sudah sepakat damai setelah mediasi pada Sabtu (9/8)," kata Kepala SMK Yapalis Krian Vulkan Abriyanto kemarin (10/8). Proses tersebut juga dihadiri pengacara dan tokoh masyarakat. "Murid sudah meminta maaf kepada guru," imbuhnya.

Vulkan mengatakan, peristiwa itu terjadi di sekolahnya pada Rabu (6/8) sekitar pukul 15.30.

Korban berinisial RA, 17, siswa kelas XII. Mulanya RA meminta izin ke toilet di jam pelajaran. Namun, remaja 17 tahun itu justru ke kantin untuk makan.

Seorang guru berinisial R, sekaligus wali kelas saat itu sedang lewat. Saat berpapasan dengan RA, guru tersebut langsung menegur. Akan tetapi RA malah naik ke lantai dua sambil membawa makanan. Menurutnya, kondisi saat itu sudah sore, guru juga lelah sehingga emosi tidak bisa terkendali dan aksi keluyuran tersebut bukan yang pertama kali. Guru dan murid pun cekcok. "Anak ini sudah beberapa kali melakukan hal serupa meski sudah dibina, mungkin saat itu gurunya sudah lelah," ujarnya. (eza/uzi)



ANGGER BONDAN/JAWA POS

TKP: SMK Yapalis di Jalan Kyai Mojo, Dusun Jeruk, Jerukgamping, Krian, kemarin (10/8). Kasus guru menampar murid di sana sudah dimediasi.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS

**AGUSTUSAN:** Ibu-ibu RW 11 Desa Trosobo, Kecamatan Taman, bermain Buntut Naga di Lapangan Wahana Wisata Edukasi Desa Trosobo kemarin (10/8). Pemain terdepan harus menyentuh kain dari pemain lawan yang berada di posisi paling belakang.

## Peringati HUT RI dengan Balap Bakiak-Gobak Sodor

**SIDOARJO** - Kampung Lali Gadget (KLG) berkolaborasi dengan warga Perum Citra Harmoni Desa Trosobo, Taman, menggelar berbagai lomba jelang peringatan hari kemerdekaan Indonesia di Lapangan Wahana Wisata Edukasi Desa Trosobo kemarin (10/8). Yang dilombakan hanya permainan tradisional.

"Kami gelar berbagai lomba mulai dari lari kelereng, pecah air, balap kodok sarung, balap bakiak, tarik tambang, buntut naga, dan gobak sodor," kata Founder KLG Achmad Irfandi. Lomba tersebut untuk memunculkan lagi nilai-nilai perjuangan yang edukatif namun tetap seru dan banyak tawa.

"Kami ingin mengembalikannya kesenangan lomba yang dulu," katanya. Irfandi mengatakan bahwa ini juga upaya agar anak-anak bisa sejenak meletakkan HP dan gadgetnya. Ia ingin anak-anak generasi sekarang bisa tahu lomba yang dulu pernah dimainkan bapak-ibunya dulu. (eza/uzi)





**TIDAK AKTIF:** Kondisi lokasi TPST Desa Pekarungan tidak lagi menerima dan mengelola sampah kemarin (10/8). Itu jadi salah satu penyebab warga membuang sampah sembarangan di sawah hingga sungai.

## TPST Desa Pekarungan Mangkrak Dua Tahun

### Picu Warga Buang Sampah Sembarangan

**SIDOARJO** - Sampah menumpuk di sepanjang Jalan Desa Pekarungan menuju Wilayat, Sukodono. Kondisi itu terjadi salah satunya lantaran Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) milik Desa Pekarungan sudah lama mangkrak. Fasilitas itu kini kosong dan tak lagi beroperasi.

Kepala TPA Griyo Mulyo Jabon, Hajid Arif Hidayat, membenarkan TPST Pekarungan sudah mati sejak lebih dari dua tahun. "Sejak 2023, tidak ada layanan sampah masuk dari Pekarungan," ujarnya kemarin (10/8).

Akibatnya, warga mencari alternatif pembuangan sampah. Ada yang menggunakan jasa vendor swasta, tapi tak sedikit memilih membuang sampah sembarangan. "Kelihatannya karena tutup itu akhirnya dibuang ke mana-mana, termasuk di pinggir jalan, sawah dan sungai," katanya.

### Harus Dikelola

dan pembuangan sampah sembarangan oleh warga, dilakukan



### SAWAH, SUNGAI, DAN JALAN JADI TEMPAT PEMBUANGAN

1. TPST Desa Pekarungan mangkrak sejak sekitar dua tahun, menyebabkan layanan pengelolaan sampah desa terhenti.
2. Sampah menumpuk di jalan, sawah, dan sungai, karena sebagian warga memilih membuang sembarangan.

3. Sebagian warga menggunakan jasa vendor swasta, namun frekuensi pengangkutan hanya tiga kali seminggu.

4. DLHK berharap TPST diaktifkan kembali atau ada solusi alternatif melalui desa atau KSM.

SUMBER: DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER

menumpuk di sungai sisi timur area Jumputrejo, Sukodono. Kami biasa mengangkutnya tiga kali seminggu, bisa tiga sampai empat truk," jelasnya.

Dia berharap TPST Pekarungan kembali aktif agar sampah warga bisa terkelola. "Kalau bisa dikelola desa atau KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) tentu bagus. Kalau tidak, harus ada opsi lain," tegasnya.

### Berbau Menyengat

Hingga kemarin (10/8) kondisi sampah masih menumpuk di pinggir sawah. Sejumlah warga masih nampak melempar sampah di area jalan tersebut. (eza/uzi)



Kelihatannya karena tutup itu akhirnya sampah dibuang ke mana-mana, termasuk di pinggir jalan, sawah dan sungai."

**HAJID ARIF HIDAYAT**  
Kepala TPA Griyo Mulyo Jabon

di sekitar TPST yang mangkrak. TPST tersebut berada di tengah sawah jalan perbatasan Pekarungan dan Wilayat. "Adanya yang dibuang ke sungai, terus sampah